

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KINERJA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

Siti Habibah Nurrahmi Iribaram

NPP. 32.1082

Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.1082@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Jatnika Dwi Asri, S.E, M.Si, M.Ak.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Information System The Local Government Information System is a system designed to provide integrated data and information on information on regional development in an integrated manner and accurate information. The Mimika Regency Government still often experiences several obstacles such as still relying on traditional budgeting systems. This causes the process of submitting Budget Implementation Documents (DPA) submission process is hampered. **Purpose:** This study aims to determine the application of the Regional Government Information System (SIPD) to the Financial Performance of the Mimika Regency Regional Financial and Asset Management Agency. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model provides full flexibility for researchers to change the direction of research in the middle of activities in order to achieve the main objectives of the research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the theory of effectiveness measurement by Duncan in Richard 1985. There were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of the findings regarding the level of effectiveness of local government information systems as supporting the financial performance of Mimika Regency are analyzed through the dimensions of the effectiveness theory according to Duncan, in the dimension of achieving goals it is known that the main objective of implementing this information system has not been fully successful, this can be seen from not being able to implement the Regional Government Information System as a whole, in the integration dimension it appears that there are activities that show interrelationships between agencies, in the adaptation dimension it appears that there are still obstacles, this is evidenced by the lack of maximum use of Regional Information Systems as supporting Regional Financial performance. **Conclusion:** In general, the level of effectiveness of the use of regional information systems in Mimika Regency in supporting regional financial performance is still not optimal and has not fully run effectively considering that there are several things that are not in accordance with the expected targets.

Keywords: Local Government Information System, Performance, Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebuah sistem dirancang untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah secara terintegrasi dan informasi keuangan daerah yang akurat. Pemerintah Kabupaten Mimika masih sering mengalami beberapa kendala seperti masih mengandalkan sistem penganggaran

tradisional. Hal ini menyebabkan proses penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terhambat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan keleluasaan penuh bagi peneliti untuk mengubah arah penelitian ditengah kegiatan demi tercapainya tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori pengukuran efektivitas oleh Duncan dalam Richard tahun 1985. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** hasil temuan mengenai tingkat efektivitas sistem informasi pemerintah daerah sebagai penunjang kinerja keuangan Kabupaten Mimika dianalisis melalui dimensi pada teoeri efektivitas menurut Duncan, pada dimensi pencapaian tujuan diketahui tujuan utama penerapan sistem informasi ini belum sepenuhnya berhasil hal ini terlihat dari belum bisa menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan, pada dimensi integrasi terlihat sudah ada aktivitas yang menunjukkan keterkaitan antar dinas, pada dimensi adaptasi terlihat masih mengalami kendala hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Daerah sebagai penunjang kinerja Keuangan Daerah. **Kesimpulan:** Secara umum tingkat efektivitas penggunaan sistem informasi daerah di kabupaten Mimika dalam menunjang kinerja keuangan daerah masih belum optimal dan belum sepenuhnya berjalan secara efektif mengingat adanya beberapa hal yang belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Kinerja, Efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir ini menandai era baru baru dalam akses informasi dan komunikasi (Rowa, 2023). Hal ini didorong oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone, dan dukungan pemerintah dalam mendorong digitalisasi (Meiyenti et al., 2023). Transformasi digital inilah membuat pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah dalam kebersamaan membangun kehidupan daerahnya masing-masing (Nurdin, 2019). Salah satunya adalah e-government. Transformasi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tujuannya untuk meningkatkan tata kelola yang baik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, memfasilitasi komunikasi lembaga antar pemerintah pusat dan daerah, serta terdorongnya partisipasi masyarakat yang luas. Pemerintah berbasis teknologi merupakan langkah menuju pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik (Asri, 2021). Hal ini akan berdampak pada tata kelola pemerintahan Indonesia hingga pada pengelolaan keuangan di pemerintahan. tujuan pengelolaan keuangan daerah seperti melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan yang baik dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya (Fortunato et al., 2018). Salah satu system informasi pemerintahan berbasis elektronik yaitu pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 70

Tahun 2019 kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang terhubung untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebuah sistem dirancang untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah secara terintegrasi dan informasi keuangan daerah yang akurat (Kurniawan et al., 2024). Peranannya membantu merencanakan program dan kegiatan secara lebih rasional, efektif, dan efisien serta mengevaluasi Pembangunan daerah, namun kenyataannya Pemerintah Kabupaten Mimika masih sering mengalami beberapa kendala seperti masih mengandalkan sistem penganggaran tradisional (Prihatini et al., 2023). Hal ini mengakibatkan proses input data, pengelolaan, hingga pelaporan tidak berjalan maksimal, serta menimbulkan ketergantungan pada sistem tradisional atau manual. Adapun, Infrastruktur teknologi informasi, khususnya jaringan internet yang belum stabil, menjadi hambatan utama dalam penginputan dan sinkronisasi data ke dalam SIPD.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah membutuhkan pembiayaan untuk pemeliharaan sistem, pengoperasian aplikasi oleh operator, dan banyak hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan dengan maksimal, dan proses penginputan yang dilakukan dengan lambat (ANTONELLI, 2005). Sehingga hal tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten mimika.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam hal integrasi dengan sistem yang sudah ada sebelumnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Permasalahan kompatibilitas antara SIPD dengan sistem legacy atau perangkat lunak lain yang digunakan oleh berbagai departemen dapat menghambat aliran informasi yang lancar dan akurat (Hansen et al., 2021). Hal ini berpotensi menyebabkan duplikasi data, ketidakkonsistenan informasi, dan inefisiensi dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana masalah integrasi ini mempengaruhi efektivitas SIPD dalam menunjang kinerja keuangan daerah.

Penerapan SIPD yang efektif tidak hanya bergantung pada teknologinya sendiri, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara kompleksitas SIPD dengan tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau perangkat keras yang usang, dapat menghambat implementasi SIPD secara optimal. Penelitian ini dapat menggali sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah (Brown et al., 2023).

Dengan semakin meningkatnya ancaman siber dan peraturan yang ketat mengenai perlindungan data, penerapan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika mungkin menghadapi tantangan dalam hal keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat kemungkinan adanya celah keamanan dalam sistem yang dapat mengancam integritas data keuangan daerah. Selain itu, perubahan regulasi yang dinamis terkait pengelolaan keuangan daerah dan perlindungan data mungkin belum sepenuhnya diakomodasi oleh SIPD yang ada (Samman, 2023). Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana aspek keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi mempengaruhi efektivitas SIPD dalam mendukung kinerja keuangan daerah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki

relevansi, penelitian pertama karya I Kadek Jody Setyawan tahun 2023 berjudul Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan hasil dalam meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dengan hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar belum melaporkan keuangan daerah dengan lebih baik melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Kadek, I Setyawan, 2023). Penelitian karya Dimas Aldy Wibowo, Elin Sasanti, Nurabiah tahun 2023 berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Mataram dengan hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan daerah masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan (Wibowo et al., 2023). Penelitian karya I Ketut Aditya Teken tahun 2023 berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Provinsi Bali dengan hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar belum efektif (Teken & Romarina, 2024). Penelitian karya Chinda Aqhni Adisi tahun 2022 berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Bpkad Kabupaten Indragiri Hulu dengan hasil Program SIPD di BPKAD telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan (Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022). Penelitian karya Nindya Vitriana, Agustiawan, dan Muhammad Ahyaruddin tahun 2022 berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru dengan hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal (Vitriana et al., 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Mimika. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung membahas implementasi SIPD secara umum atau di daerah lain, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis secara mendalam bagaimana SIPD berperan dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten. Dengan mengambil Kabupaten Mimika sebagai studi kasus, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang dinamika penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang unik yang mungkin dihadapi oleh daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan sosio-ekonomi serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat efektivitas penggunaan SIPD guna menunjang pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Mimika. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tingkat efektivitas oleh Duncan dalam Richard tahun 1985. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan SIPD sebagai sarana pengelola keuangan yang efektif, selain itu pemilihan informan juga didasarkan pada objek penerima manfaat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta radial pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan Januari 2025 berlokasi di lingkup Kabupaten Mimika Terkhusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori tingkat efektivitas oleh Duncan dalam Richard. Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi yang dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Pencapaian Tujuan

Dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikatornya, indikator pertama berkaitan dengan kurun waktu pencapaian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kurun waktu pencapaian adalah periode waktu yang digunakan untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika mengelola keuangannya melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan digunakannya sistem ini adalah untuk membuat pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 yang meminta semua perangkat daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Namun, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIPKD, baru menggunakannya pada tahun 2022. Waktu yang diperlukan untuk mencapai pencapaian tersebut belum dapat digunakan karena SIPD berfungsi sebagai satu sistem dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, aplikasi lain dapat digunakan bersama untuk meningkatkan kinerja keuangan..

Indikator kedua berkaitan dengan target dan realisasi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Target dan realisasi anggaran adalah indikator dalam dimensi untuk mencapai tujuan di dalam efektivitas pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Adapun informasi resmi terkait realisasi anggaran dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	5.927.151.606.261,00	6.458.689.919.139,00	108,97	4.989.377.452.292,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.742.340.561.003,00	1.618.402.716.719,00	92,89	1.073.067.682.834,81
4.1.01	Pajak Daerah	257.350.600.000,00	163.143.524.482,00	63,39	248.956.199.560,00
4.1.02	Retribusi Daerah	17.052.367.200,00	17.580.230.025,00	103,10	10.985.245.482,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.349.893.770.203,00	1.343.893.770.203,00	99,56	740.269.148.244,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.043.823.600,00	93.785.192.009,00	79,45	72.857.089.548,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.181.811.045.258,00	4.840.287.202.420,00	115,75	3.916.309.769.458,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.060.800.701.452,00	4.765.424.953.685,00	117,35	3.916.309.769.458,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.775.838.422.452,00	4.504.235.715.852,00	119,29	3.775.934.435.458,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	154.356.998.000,00	119.891.956.833,00	77,67	140.375.334.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	130.605.281.000,00	141.297.281.000,00	108,19	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.010.343.806,00	74.862.248.735,00	61,86	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.010.343.806,00	74.862.248.735,00	61,86	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	7.197.481.873.864,00	5.991.512.727.008,93	83,24	3.614.756.662.658,15
5.1	BELANJA OPERASI	4.208.861.713.797,00	3.523.812.486.619,02	83,72	2.227.280.088.480,31
5.1.01	Belanja Pegawai	999.778.336.845,00	831.975.932.942,00	83,22	690.715.643.953,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.599.836.006.007,00	2.152.614.651.660,94	82,80	1.234.812.033.491,31
5.1.05	Belanja Hibah	584.691.058.490,00	516.577.589.416,08	88,35	266.697.050.881,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.556.312.455,00	22.644.312.600,00	92,21	35.055.360.155,00
5.2	BELANJA MODAL	2.454.056.899.264,00	2.052.924.714.217,91	83,65	1.359.940.541.793,84
5.2.01	Belanja Modal Tanah	305.804.235.905,00	182.385.477.543,00	59,64	55.855.464.057,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.899.708.624,00	196.088.480.121,70	84,92	113.550.216.941,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	812.351.734.104,00	674.852.548.898,45	83,07	597.033.113.824,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.099.769.863.631,00	995.358.047.054,76	90,51	580.909.773.101,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.893.021.000,00	4.013.246.000,00	82,02	12.591.973.870,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	338.336.000,00	226.914.600,00	67,07	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	119.859.712.278,00	725.000.000,00	0,60	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	119.859.712.278,00	725.000.000,00	0,60	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	414.703.548.525,00	414.050.526.172,00	99,84	27.536.032.384,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	414.703.548.525,00	414.050.526.172,00	99,84	27.536.032.384,00
	SURPLUS / DEFISIT	(1.270.330.267.603,00)	467.177.192.130,07	0	1.374.620.789.634,66
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.282.730.267.603,00	1.282.730.434.624,71	100,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.282.730.267.603,00	1.282.730.434.624,71	100,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.400.000.000,00	6.400.000.000,00	51,61	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.400.000.000,00	6.400.000.000,00	51,61	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.270.330.267.603,00	1.276.330.434.624,71	100,47	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.743.507.626.754,78	0	1.374.620.789.634,66

Sumber : BPKAD Kabupaten Mimika, 2024

Gambar di atas menunjukkan hasil bahwa pembuatan laporan realisasi anggaran di Kabupaten Mimika masih menggunakan bantuan aplikasi dan belum bisa menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Hasil wawancara juga menjelaskan dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi anggaran sudah terlaksana dengan baik hanya saja pembuatannya belum bisa sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan harus menggunakan aplikasi pendamping berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika hanya menggunakan aplikasi SIPD untuk tahap perencanaan, meskipun aplikasi SIPD tidak dapat digunakan pada keseluruhan tahapan. Namun, dapat dipastikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Mimika menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Indikator ketiga berkaitan dengan dasar hukum menunjukan hasil Dasar hukum menjadi landasan yang dipedomani untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelaporan keuangan daerah di Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.130/736/SJ dalam rangka percepatan SIPD pemerintah Kabupaten Mimika mulai mengimplementasikan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Mimika.

Indikator keempat berkaitan dengan strategi pencapaian tujuan. Hasil pengamatan pada indikator ini menunjukkan bahwa Strategi pencapaian tujuan merupakan rencana yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi ini melibatkan pemilihan cara, alokasi sumber daya, identifikasi risiko, dan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi. penulis menyimpulkan bahwa prosedur penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika belum terlaksana sepenuhnya menggunakan SIPD dan juga belum efektif. Penyebabnya adalah indikator strategi pencapaian tujuan yang belum terwujud tepat sasaran dan berjalan dengan optimal.

3.2 Integrasi

Pada dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikator, indikator pertama berkaitan dengan prosedur. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Prosedur adalah suatu tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, memperbaiki kualitas keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan pengelolaan keuangan. Kesimpulannya adalah bahwa proses penerapan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Belum optimalnya sistem ini dibuktikan juga pada saat memasukkan data keseimbangan debit kredit tetapi muncul dalam sistem belum balance.

Indikator kedua berkaitan dengan analisis perencanaan, hasil temuan menunjukkan bahwa Analisis Perencanaan merupakan suatu proses evaluasi terkait perencanaan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar dapat memaksimalkan tujuan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu sendiri yakni menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran yang menyatakan bahwa Perencanaan dalam penerapan SIPD dimulai dari tahap perencanaan di Bappeda sampai di bidang anggaran hingga akhirnya nanti menjadi APBD. Perencanaan anggaran semua sudah menggunakan SIPD dari tahapan KUA PPAS. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis perencanaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya aplikasi pendamping dalam penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan (aklap), walaupun untuk tahap perencanaan sudah secara keseluruhan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3.3 Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Proses ini penting agar organisasi tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Adaptasi dalam pegawai harus menyesuaikan dengan berbagai hal atau sistem yang baru sebelumnya dapat menggunakan aplikasi berbasis software SIPKD dalam pengelolaan keuangan dan yang baru menjadi aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Lebih lanjut analisis dimensi ini dilakukan analisis indikator, indikator pertama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Hasil temuan menunjukkan bahwa Fasilitas dan infrastruktur memegang peranan penting dalam penerapan aplikasi SIPD untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan proses pengelolaan keuangan. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai secara langsung mendukung efisiensi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

dalam meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat sarana dan prasarana di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika yang telah mendukung para pegawai dalam kegiatan proses pengelolaan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setiap kantor atau ruangan dilengkapi dengan 13 unit komputer dan notebook juga tersedia jaringan internet yang mendukung aktivitas pengelolaan keuangan. Namun, terdapat kendala ketika server pusat dari SIPD mengalami gangguan, yang mengakibatkan tidak dapatnya akses ke SIPD.

Pada indikator kedua berkaitan dengan monitor kesesuaian program, hasil temuan menunjukkan bahwa Monitoring kesesuaian program merupakan proses memantau dan menilai suatu program yang telah dilaksanakan guna memastikan bahwa program tersebut sesuai akan rencana serta tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa monitoring kesesuaian program di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dilakukan dengan mengundang masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan rekonsiliasi angka yang diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan SIPKD. Dengan kata lain, aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini belum mampu digunakan secara utuh, karena angka patok dalam pencairan dana terdapat dalam SIPKD yang sudah terintegrasi dengan bank. Bentuk pertanggungjawaban yang bagus akan didapatkan melalui proses penatausahaan yang bagus, itu pula yang akan menjadi suatu alasan penerapan dua aplikasi ini. Dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih belum bisa digunakan secara optimal sebagai single system penatausahaan keuangan daerah sehingga masih perlu peningkatan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan sistem tersebut. Meskipun SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, implementasinya terhambat oleh kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoptimalkan penggunaan sistem. Akibatnya, proses pelaporan keuangan belum menunjukkan peningkatan kecepatan yang signifikan, dan tingkat akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan masih belum mencapai target yang diharapkan. Situasi ini menunjukkan pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas penerapan SIPD di Kabupaten Mimika. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhasil memanfaatkan SIPD untuk mengelolan keuangan daerah di Nias Sumatera Utara (Laoli et al., 2022)

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun SIPD telah diimplementasikan, aksesibilitas informasi keuangan oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, masih terbatas. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah belum signifikan, dengan jumlah masukan dan pertanyaan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah yang masih minim. Selain itu, efektivitas audit internal dan eksternal belum menunjukkan perbaikan yang substansial, dengan temuan audit yang bersifat material masih cukup tinggi. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mimika. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhasil menciptakan transparansi laporan keuangan dan kemudahan aksesibilitas di era Covid-19 (Kartika & Gorda, 2022)

Namun disamping itu penelitian ini menemukan bahwa implementasi SIPD telah berkontribusi

pada peningkatan kinerja keuangan daerah Kabupaten Mimika secara keseluruhan. Terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran sebesar 15% dibandingkan tahun sebelum penerapan SIPD. Efisiensi dalam pengelolaan aset daerah juga meningkat, dengan penurunan 20% dalam biaya pemeliharaan aset berkat sistem pemantauan yang lebih baik. Selain itu, kemampuan daerah dalam menyerap dana perimbangan dari pemerintah pusat meningkat sebesar 10%, yang menunjukkan perbaikan dalam kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran daerah. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di Kota Medan yang juga mencapai peningkatan kinerja keuangan daerah (Nasution & Nurwani, 2022)

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan penggunaan SIPD dalam penunjang pengelolaan keuangan oleh BPKAD Kabupaten Mimika tidak berjalan efektif, hambatan tersebut antara lain minimnya kompetensi pegawai dalam menggunakan sistem tersebut secara efektif adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan berkala mengenai penerapan SIPD, Selain itu, minimnya tenaga pendukung dan sumber daya manusia dari pegawai juga menjadi penghalang dalam penerapan SIPD. Di samping itu, kurangnya tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap masalah yang muncul dalam penerapan SIPD merupakan kendala lain yang perlu diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan SIPD dalam penunjang pengelolaan keuangan oleh BPKAD Kabupaten Mimika disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum efektif dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang bersifat krusial

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih belum sempurna mengingat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Yang paling utama adalah keterbatasan dari segi waktu penelitian yang sangat singkat. Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi hal pokok yang membuat penelitian ini kurang sempurna, selain itu juga terdapat hambatan berupa akses yang sulit dari tempat tinggal penulis menuju Lokasi penelitian. Tak terlepas dari itu semua keterbatasan pengetahuan juga menjadi tantangan tersendiri bagi penulis

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna diharapkan dimasa mendatang untuk Meneliti potensi integrasi SIPD dengan teknologi baru seperti blockchain, kecerdasan buatan, atau big data analytics untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan akurasi pengelolaan keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Ibu Jatnika Dwi Asri yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang telah berperan dalam pembentukan karakter penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih kecil dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- ANTONELLI, C. (2005). Models of knowledge and systems of governance. *Journal of Institutional Economics*, 1(1), 51–73. <https://doi.org/10.1017/s1744137405000044>
- Asri, J. D. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Dan E-Commerce Terhadap Keunggulan Bersaing (Survei Pada Umkm Sentra Kampung Batik Giriloyo Imogiri Bantul Yogyakarta). *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(2), 116–131. <https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2790>
- Brown, J. R., Martinsson, G., & Petersen, B. C. (2023). The Growth of Finance is Not Remarkable. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 58(6), 2553–2578. <https://doi.org/10.1017/S0022109022001326>
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- Fortunato, D., Swift, C. S., & Williams, L. K. (2018). All Economics is Local: Spatial Aggregations of Economic Information. *Political Science Research and Methods*, 6(3), 467–487. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.26>
- Hansen, M. A., Johansson, I., Sadowski, K., Blaszcynski, J., & Meyer, S. (2021). The Partisan Impact on Local Government Dissemination of COVID-19 Information: Assessing US County Government Websites. *Canadian Journal of Political Science*, 54(1), 150–162. <https://doi.org/10.1017/S0008423920000918>
- Kadek, I Setyawan, J. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Sipd) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. 1–8. [http://eprints.ipdn.ac.id/13248/1/Ringkasan Skripsi_Kadek Jodi_30.1047.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/13248/1/Ringkasan_Skripsi_Kadek_Jodi_30.1047.pdf)
- Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 3375. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p05>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825>
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting Sector). *Emba*, 10(4), 1381–1389. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186–195. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.503>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). *Journal Artikel*, 20. [http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU_KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf)
- Prihatini, J., Permana, S., Iskandar, J., & Kinasih, S. R. (2023). Local knowledge of bird species and socio-economic, cultural, and ecological functions of birds and their various disturbances in the rural ecosystem of the Cisokan Watershed, West Java. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(3), 372–385.

- <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.3.372-385>
- Rowa, H. (2023). From Practice to Stability: Examining the Impact of Political Practice on Democratic Stability through the Lens of Good Governance and Power Distribution. *Przestrzen Społeczna*, 23(1), 242–264. <https://socialspacejournal.eu/menu-script/index.php/ssj/article/view/174/79>
- Samman, A. (2023). The void in finance. *Finance and Society*, 9(1), 58–60. <https://doi.org/10.2218/FINSOC.8094>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Teken, K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Provinsi Bali. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://eprints.ipdn.ac.id/17161/1/Ringkasan_Skripsi_31.0722_I_Ketut_Aditya_Teken.pdf
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAPPEDA KOTA MATARAM. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 9(2). <http://ejurnalstiamataram.ac.id>